



PEMERINTAH
KABUPATEN
TEMANGGUNG

BerAKHLAK  **#bangga**
melayani
bangsa

RENCANA STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2025 - 2029



(0293) 491048



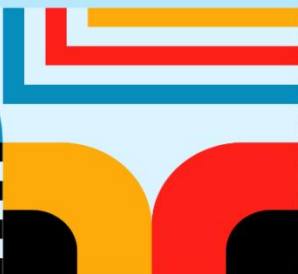
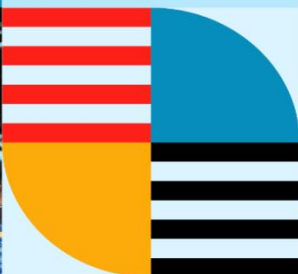
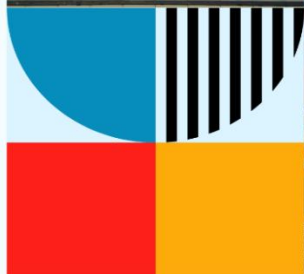
Kesbangpoltemanggung672@gmail.com



(0293) 491313



Jl Setiabudi Nomor 1 Temanggung



LEMBAR VERIFIKASI

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : 19 September 2025

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Pemerintahan



EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM
NIP. 19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator



FIKA HIDAYAH LUSIANI, ST
NIP. 19790924 200312 2 006



Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DR. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 mengacu pada dokumen RPJMD 2025-2029 yang dimaksudkan sebagai arah dalam penyusunan program dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak baik internal maupun eksternal yang telah memberikan sumbang saran dan masukan sehingga Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini dapat tersusun. Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun tetap kami butuhkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 19 September 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG



DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611110 198503 1 018

DAFTAR ISI

LEMBAR VERIFIKASI	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR TABEL	VI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	14
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	18
2.1.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	18
2.1.6 Isu Strategis.....	19
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	22
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029	22
3.2 Strategi.....	24
3.3 Arah Kebijakan	27
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	28
BAB V PENUTUP	46
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14
Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah	22
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	23
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Personil dan Tata Laksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	15
Tabel 2.2 Aset dan Modal Penunjang Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	16
Tabel 2.3 Capaian indikator SPM.....	17
Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	17
Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Kunci	18
Tabel 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis	20
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra	23
Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	24
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung.....	29
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	35
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	42
Tabel 4.4 Program Delegasi Gubernur	43
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	44
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	44
Tabel 4.7 Daftar Program Perangkat Daerah Dalam Mendukung Program Strategis Nasional.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan Pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:



Gambar 1.1 *Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah*

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Maksud disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:
 - a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur.
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:
- a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah .
 - d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Sub bab gambaran pelayanan Perangkat Daerah :

- a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah
- b. Sumber daya Perangkat Daerah
- c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- d. Kelompok sasaran layanan

2. Subbab permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah:

- a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. Isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian program

2. Uraian kegiatan

3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan

- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretaris Badan memiliki tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- h. Pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Badan;
- i. Pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Badan;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Badan;
- k. Pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Badan;

- l. Pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Badan;
 - m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.
3. Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, Sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.
- Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang

- asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang etika/budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan partai politik dan pemantauan penyelenggaraan pemilu dan situasi politik, pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

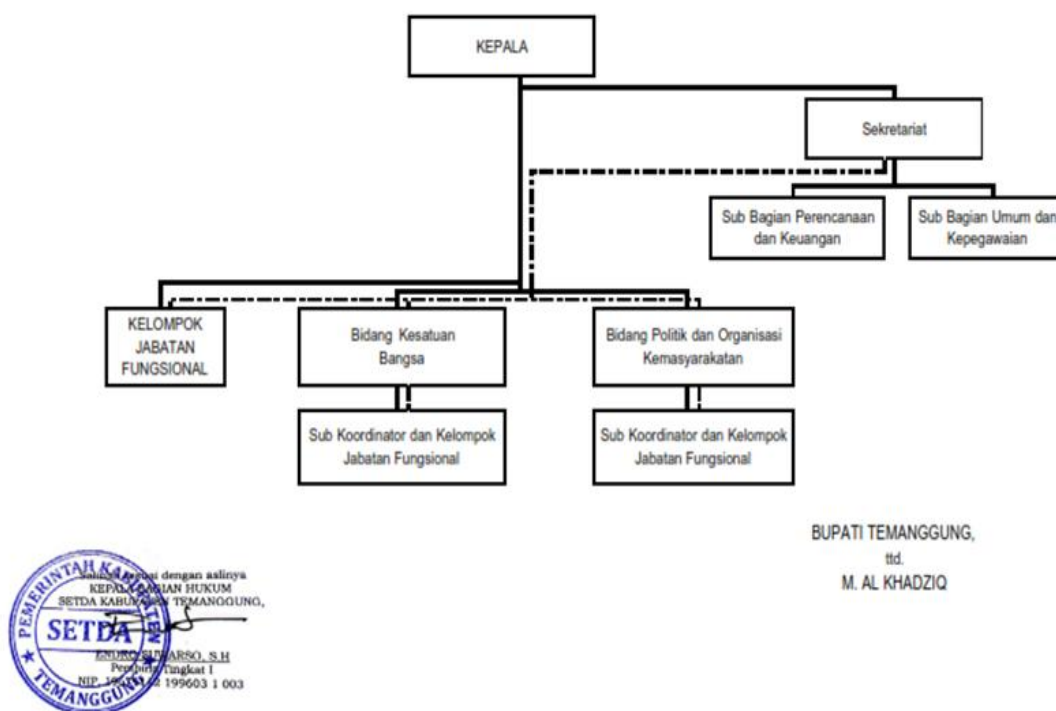
- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

2.1.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung. Berikut gambar struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan

perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Data Personil dan Tata Laksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)								GOLONGAN/ PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL *)			
	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
KEPALA PERANGKAT DAERAH							1					1			1	1
SEKRETARIS							1					1			1	1
Kepala Bidang Politik dan Organisasi Masyarakat							1					1				1
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa							1					1				1
Kasubag Umum dan Kepegawaian							1					1				
Kasubag Perencanaan dan Keuangan						1					1					
Analisis Kebijakan Ahli Muda						3	1				2	2				1
Analisis Forum Kerukunan Umat						1					1					
Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat						1					1					
Pranata Komputer Mahir						1					1					
Bendahara		1									1					
Pengelola Data		1								1						
Pengelola Kepegawaian		1								1						
Verifikator Keuangan					1					1						
Pengadministrasi Umum	1	1				1				1	2					
Pramu Bakti	1									1						
Petugas Keamanan	1								1							
TOTAL	3	4			1	8	6								2	5

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Aset dan Modal Penunjang Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	442.000.000,00	Kondisi Baik
2	Peralatan dan Mesin	264	1.621.883.467,00	Kondisi Baik
3	Gedung dan Bangunan	8	1.072.224.350,00	Kondisi Baik
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4	49.620.000,00	Kondisi Baik
5	Aset Tetap Lainnya	1	200.000,00	Kondisi Baik
6	Aset Lain-lain	2	10.500.000,00	Kondisi Baik
	Jumlah		3.196.427.817,00	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2025–2029.

2.1.3.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.3 Capaian indikator SPM

No	Indikator SPM	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
N I H I L							

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.1.3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	100	100	100	100	100	
2	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	NA	NA	NA	NA	100	
3	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	NA	NA	NA	NA	100	
4	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	NA	NA	NA	NA	100	
5	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	NA	NA	NA	NA	100	
6	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	100	100	100	100	100	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Tabel 2.4. diketahui bahwa secara umum relatif aman dan kondusif. Meskipun terjadi konflik di beberapa daerah dapat diselesaikan melalui sinergi antara pemerintah daerah, unsur forkompimda, dan unsur intelijen daerah. Dalam konteks demokrasi, Kabupaten Temanggung terus membangun wajah demokrasi menjadi semakin baik. Upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat terus dilakukan dengan menguatkan pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh pemerintah dan partai politik.

2.1.3.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
N I H I L							

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

- Organisasi Masyarakat;
- Lembaga Swadaya Masyarakat;
- Partai Politik;
- Penghayat Kepercayaan;
- FKUB;
- Lembaga pendidikan (SMP, SMA, Perguruan Tinggi);
- Intelijen Daerah; dan
- Dinas / Intansi vertikal.

2.1.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1.5.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahun 2025-2029, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain:

1. Rendahnya kualitas demokrasi Masyarakat;
2. Peran Ormas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan belum maksimal;
3. Adanya ego dan fanatisme terhadap ajaran agaman yang menghambat harmoni kerukunan umar beragama;
4. Menurunnya implementasi Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan; dan
5. Adanya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan terhadap NKRI terkait jaringan terorisme, radikalisme dan potensi konflik keamanan daerah.

2.1.6 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan membantu menciptakan kebijakan yang lebih merepresentasikan kebutuhan dan harapan masyarakat	Belum optimalnya ketercapaian kinerja pembangunan daerah	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan yang Akuntabel		Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan sdm sbg isu strategis daerah, Badan Kesbangpol mengangkat isu strategis perangkat daerah sbb : 1. Meningkatkan peran Pemerintah bersama masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penguatan mitigasi terhadap timbulnya konflik yang mengganggu stabilitas sosial ekonomi, budaya dan politik 2. Peningkatan demokratisasi dengan penguatan partisipasi politik dan membangun kemitraan strategis melalui pemberdayaan organisasi kemasyarakatan 3. Selain 2 isu diatas Badan Kesbangpol mengangkat isu penguatan ideologi Pancasila dan wawasan Kebangsaan serta P4GN guna mendukung kinerja Badan Kesbangpol 5 tahun kedepan.

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada Tahun 2024 jumlah masyarakat di Kabupaten Temanggung yang memiliki hak pilih adalah 620.026 jiwa, tersebar di 20 kecamatan dan 289 desa/kelurahan. Dari jumlah tersebut sebanyak 526.017 jiwa datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum mencapai 84,76%, menduduki peringkat ke 4 di Jawa Tengah. Merupakan sebuah prestasi dengan tingkat partisipasi yang sangat tinggi. Masyarakat ikut andil dalam demokrasi dan aktif di organisasi kemasyarakatan. Dibuktikan dengan jumlah ormas yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 176 ormas. Perwakilan masyarakat yang duduk dalam Lembaga legislatif (DPRD)

Kabupaten Temanggung diwakili oleh 10 (sepuluh) partai politik yang beranggotakan 45 orang anggota Dewan.

Temanggung adalah kabupaten yang cukup heterogen dalam umat beragamanya, semua agama ada di Kabupaten Temanggung. Kerukunan umat beragama di Kabupaten Temanggung tercermin dari sebaran jumlah pemeluk agama di 20 kecamatan dengan tingkat toleransi yang tinggi.

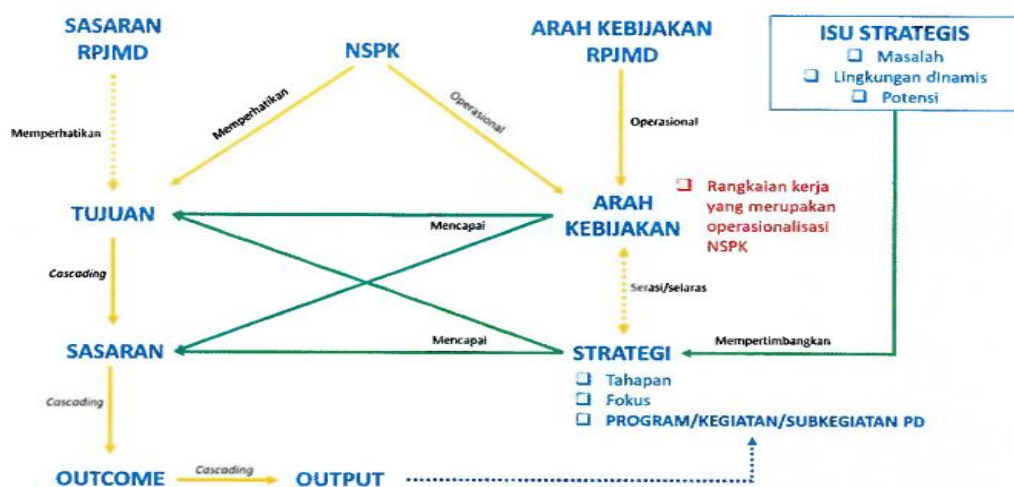
BAB III

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.

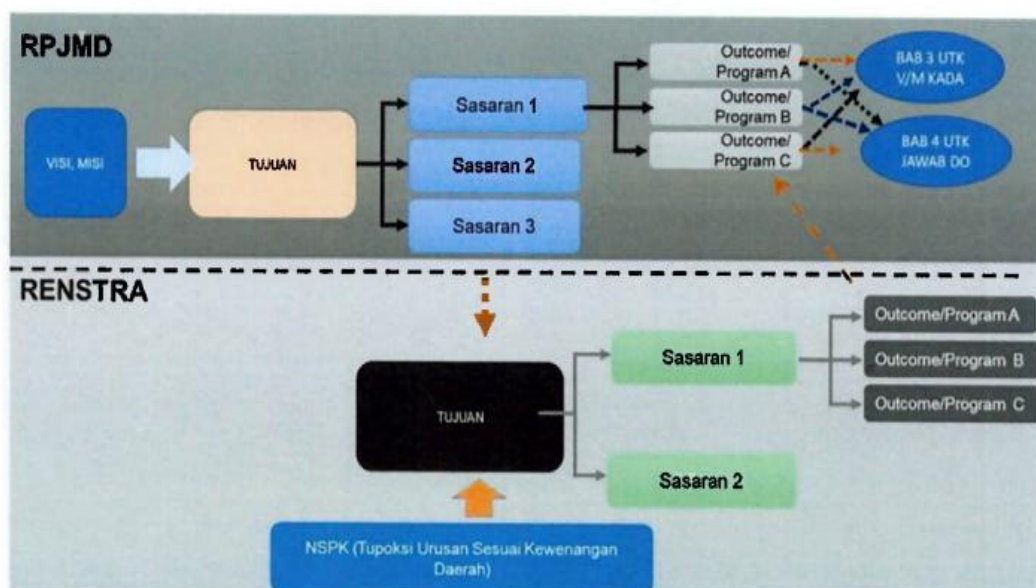
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada Tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NSPK DAN SASARAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik											
Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Mewujudkan kondusivitas wilayah melalui penanganan konflik		Persentase tertanganinya konflik di masyarakat (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya deteksi dini potensi konflik di masyarakat	Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti (%)	-	100	100	100	100	100	100	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	-	83	83.25	83.50	83.75	84.00	84.25	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	70.20	71.50	72.50	73.50	74.50	75.50	76.50	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung

TAHAP I		TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026		2027	2028	2029	2030
1	Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi partai politik	Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi partai politik	Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi partai politik	Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi partai politik	Peningkatan kapasitas kelembagaan bagi partai politik
	a Pencapaian hasil pemeriksaan BPK atas Bankeu Parpol memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian	a Pencapaian hasil pemeriksaan BPK atas Bankeu Parpol memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian	a Pencapaian hasil pemeriksaan BPK atas Bankeu Parpol memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian	a Pencapaian hasil pemeriksaan BPK atas Bankeu Parpol memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian	a Pencapaian hasil pemeriksaan BPK atas Bankeu Parpol memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian
	b Pembinaan peningkatan peran politik Perempuan (Kaukus perempuan dalam Parlemen) di 9 desa semua daerah pemilihan	b pembinaan Peningkatan peran politik Perempuan (Kaukus perempuan dalam Parlemen) di 15 desa semua daerah pemilihan (DAPIL)	b pembinaan Peningkatan peran politik Perempuan (Kaukus perempuan dalam Parlemen) di 20 desa semua daerah pemilihan (DAPIL)	b pembinaan Peningkatan peran politik Perempuan (Kaukus perempuan dalam Parlemen) di 20 Kec semua daerah pemilihan (DAPIL)	b pembinaan Peningkatan peran politik Perempuan (Kaukus perempuan dalam Parlemen) di 20 Kec semua daerah pemilihan (DAPIL)
2	Peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat (Perempuan, Generasi Muda, Milenial dan Gen-Z)	Peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat (Perempuan, Generasi Muda, Milenial dan Gen-Z)	Peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat (Perempuan, Generasi Muda, Milenial dan Gen-Z)	Peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat (Perempuan, Generasi Muda, Milenial dan Gen-Z)	Peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat (Perempuan, Generasi Muda, Milenial dan Gen-Z)
	a Peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam pemilu/pemilukada 2029	a Peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam pemilu/pemilukada 2029	a peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam pemilu/pemilukada 2029	a peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam pemilu/pemilukada dari angka 2024 84,76 % menjadi 85%	a peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam pemilu/pemilukada
	b Peningkatan keterwakilan perempuan dalam legislatif mencapai 30% (pemilu 2029)	b Peningkatan keterwakilan perempuan dalam legislatif mencapai 30% (pemilu 2029)	b Peningkatan keterwakilan perempuan dalam legislatif mencapai 30% (pemilu 2029)	b Peningkatan keterwakilan perempuan dalam legislatif mencapai 30% dalam pemilu 2029	b Peningkatan keterwakilan perempuan dalam legislatif mencapai 30%

TAHAP I		TAHAP II		TAHAP III		TAHAP IV		TAHAP V	
2026		2027		2028		2029		2030	
3	Pembinaan kelembagaan organisasi masyarakat - Peningkatan optimalisasi peran ormas dalam pembangunan daerah - Pembinaan, dan pemberdayaan ormas	Pembinaan kelembagaan organisasi masyarakat - Peningkatan optimalisasi peran ormas dalam pembangunan daerah - Pembinaan dan pemberdayaan ormas	Pembinaan kelembagaan organisasi masyarakat - Peningkatan optimalisasi peran ormas dalam pembangunan daerah - Pembinaan dan pemberdayaan ormas	Pembinaan kelembagaan organisasi masyarakat - Peningkatan optimalisasi peran ormas dalam pembangunan daerah - Pembinaan dan pemberdayaan ormas	Pembinaan kelembagaan organisasi masyarakat - Peningkatan optimalisasi peran ormas dalam pembangunan daerah - Pembinaan dan pemberdayaan ormas	Pembinaan kelembagaan organisasi masyarakat - Peningkatan optimalisasi peran ormas dalam pembangunan daerah - Pembinaan dan pemberdayaan ormas	Pembinaan kelembagaan organisasi masyarakat - Peningkatan optimalisasi peran ormas dalam pembangunan daerah - Pembinaan dan pemberdayaan ormas	Pembinaan kelembagaan organisasi masyarakat - Peningkatan optimalisasi peran ormas dalam pembangunan daerah - Pembinaan dan pemberdayaan ormas	Pembinaan kelembagaan organisasi masyarakat - Peningkatan optimalisasi peran ormas dalam pembangunan daerah - Pembinaan dan pemberdayaan ormas
4	Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba	Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba	Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba	Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba	Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba	Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba	Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba	Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba	Melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba
	a Sosialisasi bahaya narkoba	a Sosialisasi bahaya narkoba	a Sosialisasi bahaya narkoba	a Sosialisasi bahaya narkoba	a Sosialisasi bahaya narkoba	a Sosialisasi bahaya narkoba	a Sosialisasi bahaya narkoba	a Sosialisasi bahaya narkoba	a Sosialisasi bahaya narkoba
	b Peringatan Hari Anti Narkoba	b Peringatan Hari Anti Narkoba	b Peringatan Hari Anti Narkoba	b Peringatan Hari Anti Narkoba	b Peringatan Hari Anti Narkoba	b Peringatan Hari Anti Narkoba	b Peringatan Hari Anti Narkoba	b Peringatan Hari Anti Narkoba	b Peringatan Hari Anti Narkoba
	c Menurunnya kasus narkoba	c Menurunnya kasus narkoba	c Menurunnya kasus narkoba	c Menurunnya kasus narkoba	c Menurunnya kasus narkoba	c Menurunnya kasus narkoba	c Menurunnya kasus narkoba	c Menurunnya kasus narkoba	c Menurunnya kasus narkoba
5	Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pendidikan formal, non formal dan informal	Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pendidikan formal, non formal dan informal	Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pendidikan formal, non formal dan informal	Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pendidikan formal, non formal dan informal	Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pendidikan formal, non formal dan informal	Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pendidikan formal, non formal dan informal	Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pendidikan formal, non formal dan informal	Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pendidikan formal, non formal dan informal	Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pendidikan formal, non formal dan informal
	a Sosialisasi pendidikan Pancasila	a Sosialisasi pendidikan Pancasila	a Sosialisasi pendidikan Pancasila	a Sosialisasi pendidikan Pancasila	a Sosialisasi pendidikan Pancasila	a Sosialisasi pendidikan Pancasila	a Sosialisasi pendidikan Pancasila	a Sosialisasi pendidikan Pancasila	a Sosialisasi pendidikan Pancasila
	b Sosialisasi Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada Guru SD, SMP, Korwil SD, Korwil SMP	b Penyusunan rencana dan program Pendidikan dan pelatihan Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan (Pembentukan Kepengurusan Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan-SK Bupati)	b Penyusunan rencana dan program Pendidikan dan pelatihan Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan (Penyusunan kurikulum pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan)	b Penyusunan rencana dan program Pendidikan dan pelatihan Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan (Penyusunan kurikulum pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan)	b Penyusunan rencana dan program Pendidikan dan pelatihan Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan (Penyusunan kurikulum pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan)	b Sosialisasi kurikulum pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan	b Sosialisasi kurikulum pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan	b Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan	b Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan
	c Transparansi dalam proses seleksi paskibraka yang berbasis teknologi	b Transparansi dalam proses seleksi paskibraka yang berbasis teknologi	b Transparansi dalam proses seleksi paskibraka yang berbasis teknologi	b Transparansi dalam proses seleksi paskibraka yang berbasis teknologi	b Transparansi dalam proses seleksi paskibraka yang berbasis teknologi	b Transparansi dalam proses seleksi paskibraka yang berbasis teknologi	b Transparansi dalam proses seleksi paskibraka yang berbasis teknologi	c Transparansi dalam proses seleksi paskibraka yang berbasis teknologi	c Transparansi dalam proses seleksi paskibraka yang berbasis teknologi
	d Peningkatan kualitas anggota paskibraka menuju Paskibraka tingkat provinsi	Peningkatan kualitas anggota paskibraka menuju Paskibraka tingkat provinsi	Peningkatan kualitas anggota paskibraka menuju Paskibraka tingkat provinsi	Peningkatan kualitas anggota paskibraka menuju Paskibraka tingkat provinsi	Peningkatan kualitas anggota paskibraka menuju Paskibraka tingkat provinsi	Peningkatan kualitas anggota paskibraka menuju Paskibraka tingkat provinsi	Peningkatan kualitas anggota paskibraka menuju Paskibraka tingkat provinsi	peningkatan kualitas paskibraka menuju paskibraka nasional	peningkatan kualitas paskibraka menuju paskibraka nasional

TAHAP I		TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026		2027	2028	2029	2030
	e	Pembudayaan gotong royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan	Pembudayaan gotong royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan	Pembudayaan gotong royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan	Pembudayaan gotong royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan
	f	Pelaksanaan kegiatan bersama Forum pembauran kebangsaan	Pelaksanaan kegiatan bersama Forum pembauran kebangsaan	Pelaksanaan kegiatan bersama Forum pembauran kebangsaan	Pelaksanaan kegiatan bersama Forum pembauran kebangsaan
6		Meningkatkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam mencegah konflik	Meningkatkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam mencegah konflik	Meningkatkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam mencegah konflik	Meningkatkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam mencegah konflik
	a	Mengoptimalkan tim kewaspadaan dini daerah dalam pencegahan dan penanganan konflik - Pelaksanaan sarasehan pencegahan dan penanganan konflik bersama tim Wasdin	a Mengoptimalkan tim kewaspadaan dini daerah dalam pencegahan dan penanganan konflik - Memberikan sosialisasi penanganan konflik kepada organisasi masyarakat	a Mengoptimalkan tim kewaspadaan dini daerah dalam pencegahan dan penanganan konflik - Memberikan sosialisasi penanganan konflik kepada organisasi kepemudaan	A Mengoptimalkan tim kewaspadaan dini daerah dalam pencegahan dan penanganan konflik
	b	Pelaksanaan dialog bersama pemuka agama dan tokoh masyarakat	b Pelaksanaan dialog bersama pemuka agama dan tokoh masyarakat	b Pelaksanaan dialog bersama pemuka agama dan tokoh masyarakat	b Pelaksanaan dialog bersama pemuka agama dan tokoh masyarakat
7		Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penghayat aliran Kepercayaan	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penghayat aliran Kepercayaan	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penghayat aliran Kepercayaan	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penghayat aliran Kepercayaan
8		Survey Indeks Harmoni dengan peningkatan capaian angka di tahun 2026 : 6,82	Survey Indeks Harmoni dengan peningkatan capaian angka di tahun 2027: 6,92	Survey Indeks Harmoni dengan peningkatan capaian angka di tahun 2028 : 7,02	Survey Indeks Harmoni dengan peningkatan capaian angka di tahun 2029 : 7,12
9		Peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menuju Predikat A	Peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menuju Predikat A	Peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menuju Predikat A	Peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menuju Predikat A

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode Tahun 2025–2029. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 dijabarkan melalui tabel 3.3.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Badan Kesbangpol	Ket
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui pembinaan ekonomi sosial budaya politik dan ormas untuk terjaganya kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila.	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan kewaspadaan daerah melalui deteksi dini, pengawasan orang asing dan penanganan konflik yang komprehensif.	
2		Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan	Peningkatan penyelenggaraan dan cakupan pemahaman ideologi dan kebangsaan	
3		Peningkatan kerukunan umat beragama	Melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketahanan, ekonomi, sosial dan budaya guna mendukung kerukunan dan stabilitas di tengah masyarakat.	
4		Pemberdayaan organisasi masyarakat	Fasilitasi dan penguatan struktur organisasi kemasyarakatan	
			Fasilitasi dan penguatan kelembagaan partai politik dan pendidikan politik bagi masyarakat	

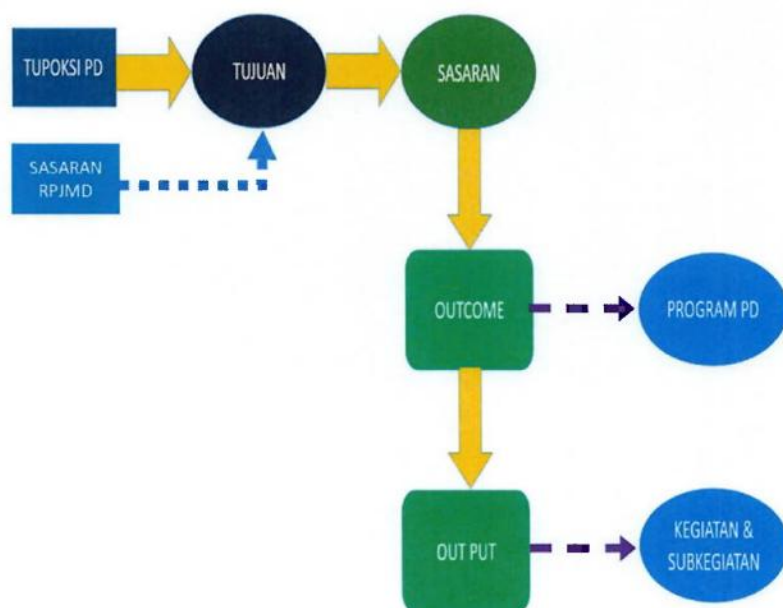
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4.1 *Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra*
Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
- Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya	Mewujudkan kondusivitas wilayah melalui penanganan konflik	Meningkatnya deteksi dini potensi konflik di masyarakat			Persentase tertanganinya konflik di masyarakat		
					Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		
					Nilai AKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	8.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila			8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
				Tersusunnya kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	8.01.02.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya demokrasi melalui pendidikan politik		Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
				Tersusunnya kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
			Meningkatnya ormas yang berdaya		Persentase ormas yang mendapat pembinaan	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
				Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya koordinasi dalam deteksi dini		Persentase koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kerukunan agama, budaya, suku, dan kondisi sosial ekonomi yang kondusif		Jumlah kejadian konflik SARA	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
				Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	8.01.05.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD	K E T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(0)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				7.257.584.872,00		7.294.124.430,00		7.404.554.127,00		7.591.643.183,00		7.578.362.090,00		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian				4.118.552.372,00		4.152.894.608,00		4.219.661.210,00		4.346.874.279,00		4.331.321.849,00	8.01.0.00.01.00	
8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.736.085.912,00		3.770.428.148,00		3.837.194.750,00		3.964.407.819,00		3.948.855.389,00		
Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	23	3.736.085.912,00	23	3.770.428.148,00	23	3.837.194.750,00	23	3.964.407.819,00	23	3.948.855.389,00	00 - Badan Kesatuan	
8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.736.085.912,00		3.770.428.148,00		3.837.194.750,00		3.964.407.819,00		3.948.855.389,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	23	3.736.085.912,00	23	3.770.428.148,00	23	3.837.194.750,00	23	3.964.407.819,00	23	3.948.855.389,00	Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				108.966.460,00		108.966.460,00		108.966.460,00		108.966.460,00		108.966.460,00		
Terlaksananya administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	108.966.460,00	12	108.966.460,00	12	108.966.460,00	12	108.966.460,00	12	108.966.460,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	10		10		10		10		10			
8.01.01.2.06.0001 – Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00		
8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.966.460,00		16.966.460,00		16.966.460,00		16.966.460,00		16.966.460,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	16.966.460,00	3	16.966.460,00	3	16.966.460,00	3	16.966.460,00	3	16.966.460,00		
8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		
8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
8.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00		
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				215.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	215.000.000,00	12	215.000.000,00	12	215.000.000,00	12	215.000.000,00	12	215.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				30.910.400,00		30.910.400,00		30.910.400,00		30.910.400,00		30.910.400,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	30.910.400,00	12	30.910.400,00	12	30.910.400,00	12	30.910.400,00	12	30.910.400,00		
8.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	10	6.000.000,00	10	6.000.000,00	10	6.000.000,00	10	6.000.000,00	10	6.000.000,00		
8.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				178.089.600,00		178.089.600,00		178.089.600,00		178.089.600,00		178.089.600,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	178.089.600,00	12	178.089.600,00	12	178.089.600,00	12	178.089.600,00	12	178.089.600,00		
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				58.500.000,00		58.500.000,00		58.500.000,00		58.500.000,00		58.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	58.500.000,00	3	58.500.000,00	3	58.500.000,00	3	58.500.000,00	3	58.500.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	10		10		10		10		10			
8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD	K E T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	12	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	12	45.000.000,00	8.01.0.00.01.00	
8.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	01.00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	6.000.000,00	3	6.000.000,00	3	6.000.000,00	3	6.000.000,00	3	6.000.000,00	00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	10	7.500.000,00	10	7.500.000,00	10	7.500.000,00	10	7.500.000,00	10	7.500.000,00		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				535.000.000,00		535.374.500,00		542.816.206,00		553.021.150,00		553.408.265,00		
Meningkatnya wawasan kebangsaan dan Ideologi Pancasila	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100	100	535.000.000,00	100	535.374.500,00	100	542.816.206,00	100	553.021.150,00	100	553.408.265,00		
8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter				535.000.000,00		535.374.500,00		542.816.206,00		553.021.150,00		553.408.265,00		
Tersusunnya kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	-	2	535.000.000,00	2	535.374.500,00	2	542.816.206,00	2	553.021.150,00	2	553.408.265,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350	350		350		350		350		350			
8.01.02.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	-	2	110.000.000,00	2	110.000.000,00	2	110.000.000,00	2	110.000.000,00	2	110.000.000,00		
8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				425.000.000,00		425.374.500,00		432.816.206,00		443.021.150,00		443.408.265,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	350	350	425.000.000,00	350	425.374.500,00	350	432.816.206,00	350	443.021.150,00	350	443.408.265,00		
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				1.827.819.500,00		1.829.098.973,00		1.854.523.449,00		1.889.388.490,00		1.890.711.062,00		
Meningkatnya demokrasi melalui pendidikan politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	100	100	1.827.819.500,00	100	1.829.098.973,00	100	1.854.523.449,00	100	1.889.388.490,00	100	1.890.711.062,00	8.01.00.01.00 - Ba da n Ke sat ua n	
8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1.827.819.500,00		1.829.098.973,00		1.854.523.449,00		1.889.388.490,00		1.890.711.062,00		
Tersusunnya kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10	10	1.827.819.500,00	10	1.829.098.973,00	10	1.854.523.449,00	10	1.889.388.490,00	10	1.890.711.062,00	Ba ngs a da n Pol itik	
8.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1.827.819.500,00		1.829.098.973,00		1.854.523.449,00		1.889.388.490,00		1.890.711.062,00		
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10	10	1.827.819.500,00	10	1.829.098.973,00	10	1.854.523.449,00	10	1.889.388.490,00	10	1.890.711.062,00		
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				40.000.000,00		40.028.000,00		40.584.389,00		41.347.376,00		41.376.319,00		
Meningkatnya ormas yang berdaya	Persentasae ormas yang mendapat pembinaan	18.18	20	40.000.000,00	23	40.028.000,00	26	40.584.389,00	29	41.347.376,00	32	41.376.319,00		
8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											K F
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12	12	40.000.000,00	12	40.028.000,00	12	40.584.389,00	12	41.347.376,00	12	41.376.319,00	8.01.00.01.00	
8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				40.000.000,00		40.028.000,00		40.584.389,00		41.347.376,00		41.376.319,00	00 - Ba da n	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12	12	40.000.000,00	12	40.028.000,00	12	40.584.389,00	12	41.347.376,00	12	41.376.319,00	Ke sat ua n	
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				200.000.000,00		200.140.000,00		202.921.946,00		206.736.879,00		206.881.594,00	Ba ngs a da n	
Meningkatnya kerukunan agama, budaya, suku, dan kondisi sosial ekonomi yang kondusif	Jumlah kejadian konflik SARA	1	8	200.000.000,00	8	200.140.000,00	8	202.921.946,00	7	206.736.879,00	7	206.881.594,00	Pol itik	
8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				200.000.000,00		200.140.000,00		202.921.946,00		206.736.879,00		206.881.594,00		
Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	120	120	200.000.000,00	120	200.140.000,00	120	202.921.946,00	120	206.736.879,00	120	206.881.594,00		
	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	-	1		1		1		1		1			
8.01.05.2.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100.000.000,00		100.140.000,00		102.921.946,00		106.736.879,00		106.881.594,00		
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1	100.000.000,00	1	100.140.000,00	1	102.921.946,00	1	106.736.879,00	1	106.881.594,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD	K E T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	120	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00		
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				536.213.000,00		536.588.349,00		544.046.927,00		554.275.009,00		554.663.001,00		
Meningkatnya koordinasi dalam deteksi dini				536.213.000,00		536.588.349,00		544.046.927,00		554.275.009,00		554.663.001,00	8.0	
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				536.213.000,00		536.588.349,00		544.046.927,00		554.275.009,00		554.663.001,00	1.0	
Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	72	72	536.213.000,00	72	536.588.349,00	72	544.046.927,00	72	554.275.009,00	72	554.663.001,00	0.0	Ba dan Ke sat uan Ba ngs a dan Poli tik
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	100	100		100		100		100		100		0.0	
8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				263.727.500,00		264.102.849,00		271.561.427,00		281.789.509,00		282.177.501,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100	100	263.727.500,00	100	264.102.849,00	100	271.561.427,00	100	281.789.509,00	100	282.177.501,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD	K E T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(0)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				272.485.500,00		272.485.500,00		272.485.500,00		272.485.500,00		272.485.500,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	7 2	72	272.485.500,00	72	272.485.500,00	72	272.485.500,00	72	272.485.500,00	72	272.485.500,00		

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM AKSI BUPATI & WAKIL BUPATI	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN					
				2026	2027	2028	2029	2030	
	Pengembangan kerjasama dan pemberdayaan mitra pembangunan strategis daerah								
1	Peningkatan optimalisasi peran ormas dalam pembangunan daerah	Meningkatnya peran aktif ORMAS demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sehingga mampu menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, serta mencegah terjadinya konflik untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni	Program : Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya Sub Kegiatan : Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi , sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Rp. 80.000. 000,00	Rp. 80.056. 000,00	Rp. 81.168. 778,40	Rp. 82.694. 751,00	Rp. 83.273. 615,00	
2	Pembinaan dan pemberdayaan ormas	Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan, kemandirian ormas dan partai politik untuk menjadi organisasi yang kuat mandiri, dan berkontribusi aktif pada pembangunan	Program : Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 40.000. 000,00	Rp. 40.028. 000,00	Rp. 40.584. 389,20	Rp. 41.347. 376,00	Rp. 41.636. 807,00	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dari tabel diatas diketahui bahwa Badan Kesbangpol memiliki 1 program prioritas yang mendukung program prioritas Pembangunan daerah dengan 2 program aksi yaitu Peningkatan optimalisasi peran ormas dalam pembangunan daerah dan Pembinaan dan pemberdayaan ormas.

Tabel 4.4 Program Delegasi Gubernur

NO	PROGRAM DELEGASI GUBERNUR	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1.	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Meningkatnya rasa cinta tanah air dan persatuan kesatuan bangsa serta mencegah radikalisme	Program : Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
2.	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	Terwujudnya masyarakat yang harmonis, damai, dan rukun, serta persatuan nasional semakin kuat.	Program : Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya Sub Kegiatan : Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 2 program delegasi gubernur yaitu 1) Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan dan 2) Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan. Program delegasi gubernur tersebut tercakup pada nomenklatur Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, dan Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	8.01.0.00.0.00.01.0000 – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
1.	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti	%	-	100	100	100	100	100	100	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	-	86.95	87.56	88.17	88.78	89.39	90	
4.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	70.2	71.5	72.5	73.5	74.5	75.5	76.5	

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan tabel 4.5 dijelaskan bahwa Indikator Tujuan Perangkat Daerah yaitu Persentase tertanganinya konflik di masyarakat memiliki target 100% mulai dari Tahun 2025 sampai dengan 2030. Persentase tertanganinya konflik di masyarakat dihitung dengan rumus jumlah konflik yang tertangani dibagi jumlah konflik keseluruhan dikali 100%. Kemudian untuk indikator sasaran perangkat daerah yaitu Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti juga memiliki target 100% pada Tahun 2025 sampai dengan 2030. Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti diperoleh dengan rumus penghitungan Jumlah data potensi konflik yang ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah data potensi konflik yang masuk dikalikan 100%.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL										

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa tidak terdapat indikator kinerja kunci pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode Tahun 2025-2029.

Tabel 4.7 Daftar Program Perangkat Daerah Dalam Mendukung Program Strategis Nasional

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)					KET
				2026	2027	2028	2029	2030	
N I H I L									

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa tidak ada program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode Tahun 2025-2029 yang mendukung Program Strategis Nasional.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan atau target kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025 - 2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka

mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Rentra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini.

Temanggung, 19 September 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Temanggung



DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM
NIP. 19721126 199203 1 002

LAMPIRAN

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tujuan Dan Sasaran Strategis Pemda	Tujuan Dan Sasaran Pd	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Pd	Proses Bisnis	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Kode Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman	Terwujudnya kondusifitas wilayah melalui penanganan konflik	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat										
	Meningkatnya deteksi dini potensi konflik di masyarakat	Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti	Koordinasi dan Intergrasi Lintas PD	Risiko Kebijakan	Benturan kepentingan/tumpang tindih aturan		17	Setiap lembaga mempunyai kewenangan dalam membuat aturan	Kebingungan dalam pelaksanaan tugas Konflik antar lembaga	Komitmen / MOU bersama antar lembaga untuk deteksi dan penanganan konflik	Kepala Badan	2025-2029
				Risiko Fraud/Kecurangan	Pelaporan data/informasi yang tidak valid		17	Personil tidak mendalami kasus dengan baik/tidak melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh	Keresahan publik Penurunan kepercayaan pada institusi	Menyusun SOP pelaporan informasi deteksi dini Memberikan Pendidikan pelatihan berkala bagi tim kewaspadaan dini	Kepala Badan	2025-2029

										daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengumpulkan informasi dan melakukan deteksi dini		
				Risiko Pemangku Kepentingan	Kurangnya komunikasi antar lembaga dalam deteksi dan penanganan konflik		16	Minimnya rakor dengan tim intelijen daerah	Timbul kesalahpahaman Solusi tidak efektif Memperburuk konflik	Penguatan hubungan kelembagaan dengan melaksanan akan pertemuan/ koordinasi tatap muka melalui rapat koordinasi	Kepala Badan	2025-2029

				Risiko Operasional	Apatisme masyarakat terhadap berbagai hal yang terjadi di sekitar termasuk masalah sosial dan politik		16	Kebijakan yang tidak efektif Marak informasi Hoax Kurangnya keteladanan	Ancaman rapuhnya persatuan Perpecahan di masyarakat karena kurangnya kepedulian sosial	Memberikan Sosialisasi /edukasi kepada masyarakat Mendorong partisipasi aktif tokoh agama dan pemuda	Kepala Badan	2025-2029
--	--	--	--	-----------------------	---	--	----	---	--	--	--------------	-----------

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik